



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
SUB UNIT KERJA : FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WIDIATMONO**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN TATA USAHA**
3. NHK : **93193**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 539.485.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/27 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KOTA SURAKARTA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 154 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Bangunan Seluas 106 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
5. Tanah Seluas 239 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 27.485.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 61.300.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
3. MOBIL, ISUZU PANTHER MINIBUS Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 46.500.000
4. LAINNYA, - SEPEDA TANDEM RAKITAN SECOND Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 4.292.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	79.599.512
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	684.676.512
III. HUTANG	Rp.	120.726.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	563.950.512

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.